

## **PROFESIONALISME DAN SERTIFIKASI GURU DI ERA REFORMASI PENDIDIKAN**

**Oleh : Irwandi**

*Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*

### **ABSTRAK**

Profesionalisme guru, tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah: Kompetensi profesional, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat. Kompetensi personal, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang gaul dan "funky" sehingga menjadi dambaan setiap orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat. Penilaian terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks, menyangkut kemampuan profesional, personal, sosial termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Penilaian harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada bidang kependidikan.

**Kata Kunci: Sumber daya kependidikan yang berkualitas dan profesional**

## A. Pendahuluan

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak yang ikut meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, stakeholder, kalangan pendidik serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih.

Dari pihak yang disebutkan di atas, dalam pembahasan tulisan ini yang disoroti hanya masalah “guru”, sebab guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik atas ketidakberesan sistem pendidikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, pada sisi lain guru juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tataran pendidikan. Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan di sekolah yang lebih baik.<sup>1</sup>

Pandangan di atas, rasanya tidak mudah untuk menjadi guru dewasa ini, sebab guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik permasalahan pendidikan di Indonesia. Menjadi guru merupakan profesi yang penuh dengan tantangan. Guru berhadapan dengan tuntutan kualitas profesi, amanah dari orang, masyarakat, stakeholder, pemerintah dan karena guru tetap dianggap memiliki akuntabilitas atas keberhasilan pembelajaran akademis siswa. Guru juga berhadapan dengan tuntutan perubahan yang begitu cepat, seperti informasi yang begitu mudah diakses melalui internet yang sudah barang tentu akan mengubah aspek-aspek pendidikan konvensional yang selama ini ditekuni. Hal ini, tentu saja akan memaksa para guru untuk mengubah model dan metode belajar mengajar yang selama ini ditekuni serta materi dan jenis tugas-tugas yang diberikan kepada murid.

Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai dan jelas hal ini ikut menentukan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional kita yang rendah, menurut beberapa pakar pendidikan, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya mutu guru itu sendiri di samping faktor-faktor yang lain. Maka, sebenarnya permasalahan guru di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu menyangkut semua aspek yang terkait berupa kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Naniek Setijadi, From: <http://tpj.bpkpenabur.or.id/...>, akses, Selasa, 26 April 2005, jam 10.15

<sup>2</sup> Baca: Purwanto, <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>. Tetapi, ”setiap kali membedah mutu pembelajaran, guru selalu dijadikan kambing hitam. Terlebih dengan mutu pendidikan Indonesia yang terus terpuruk dibanding negara tetangga” Kompas, 10 Maret 2004, dalam Naniek Setijadi, From: <http://tpj.bpkpenabur.or.id/...>, akses, Selasa, 26/4/2005, jam 10.15

Sumber permasalahan pendidikan di Indonesia, sebenarnya bukan hanya pada persoalan guru saja, tetapi persoalan perhatian pemerintah dan masyarakat, dana, kurikulum, metodologi, manajemen, pimpinan sekolah yang memiliki kemampuan profesional dan integritas dalam mengelola pendidikan.

Rendahnya kualitas tenaga kependidikan, merupakan masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Katakan saja sebagai contoh, motivasi menjadi tenaga pendidik di kebanyakan sekolah-sekolah Islam selama ini dikarenakan dan hanya dilandasi oleh faktor pengabdian dan keikhlasan, sedangkan dari sisi kemampuan, kecakapan dan disiplin ilmu dikatakan masih rendah.<sup>3</sup> Hal ini, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Islam dan tentu mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Maka, masalah pokok dalam pendidikan Islam pada dasarnya adalah masalah yang terkait dengan faktor kualitas tenaga guru.<sup>4</sup>

Fazlur Rahman, menyatakan Indonesia, seperti halnya negeri-negeri muslim besar lainnya, juga menghadapi masalah pokok dalam modernisasi pendidikan Islam : yaitu masalah kelangkaan tenaga yang memadai untuk mengajar dan melakukan riset.<sup>5</sup> Pandangan ini, menjadi tantangan dan persoalan bagi pendidikan Islam di Indonesia untuk berusaha membangun kualitas sumber dayanya.

Tuntutan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan profesional menjadi suatu keharusan pada era global, informasi dan reformasi pendidikan. Indikator perubahan sekarang yang dapat diamati adalah sebagian guru mulai melanjutkan pendidikannya kejenjang S-2, sekolah-sekolah mulai menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), mulai dan sudah berbenah menuju manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah. Dengan demikian, sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.<sup>6</sup> Maka, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, menuntut sumber daya pimpinan, guru, dan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan profesional dan integritas dalam mengelola pendidikan.

Pelaksanaan program-program pendidikan didukung dengan kepemimpinan yang demokratis dan profesional, guru-guru yang profesional dan memiliki kompetensi dalam

---

<sup>3</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI, 2003), hal. 226

<sup>4</sup> Asep Saeful Mimbar dan Agus Sulthonie, 25 Juli 2001.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, 1985, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Terj., Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hal. 151

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 24

bidangnya masing-masing, serta tenaga administrasi profesional dalam pengelolaan administrasi pendidikan.<sup>7</sup>

Program peningkatan kemampuan sumber daya pendidikan berupa training for trainers atau kemampuan untuk belajar terus menerus untuk meningkatkan kualitas bagi para pendidik yang merupakan suatu fokus dan tuntutan yang perlu diperhatikan.

Dengan kata lain, lembaga-lembaga pendidikan harus melakukan investasi secara periodik bagi para guru jika ingin tetap memimpin di dunia pendidikan, karena apabila gagal dalam investasi guru akan berakibat fatal dalam persaingan merebut animo pengguna pendidikan sebagai pengakuan terhadap kualitas lembaga pendidikan tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Profesionalisme Guru

Berbicara tentang profesional guru sangat komprehensif. Profesi guru harus dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi, di sekolah ia harus menjadi manusia model yang akan ditiru siswanya, di masyarakat menjadi tauladan.

”Dalam Jurnal Education Leadership (terbit Maret 1994), ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu :

1. Memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya.
2. Secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan.
3. Bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi.
4. Mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas.
5. Seyogianya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya.<sup>9</sup>

Malcon Allerd, mengatakan bahwa selain kelima aspek itu, sifat dan kepribadian guru amat penting artinya bagi proses pembelajaran adalah adaptabilitas, entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan kerjasama yang baik. Guru juga dituntut untuk mereformasi pendidikan, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di luar sekolah, perombakan struktural hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya hubungan

---

<sup>7</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat*, 2003, hal. 226

<sup>8</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam...*, hal. 227

<sup>9</sup> P. Ruspenti, 2004, Profesionalisme Guru, Harapan dan Kenyataan, From: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/0310.htm>, selasa 26 april 2005, jam 10.30

pertemanan, penggunaan teknologi modern dan penguasaan iptek, kerja sama dengan teman sejawat antar sekolah, serta kerja sama dengan komunitas lingkungannya.<sup>10</sup>

Pandangan ini, menunjukkan bahwa betapa tingginya profesionalisme guru, tetapi apabila dilihat dari kondisi guru yang ada mulai dari aspek kemampuan, kesejahteraan dan fasilitas yang memadai, terasa sulit bagi guru untuk survive mengikuti tuntutan ini.

Dengan demikian, profesionalisme guru tidak hanya berpulang pada guru itu sendiri, tetapi diperlukan *political will* dari pemerintah, dukungan, penghargaan, perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui *in service training*. Maka, untuk lebih jelas menurut hemat penulis, perlu mencermati perkemabangan dan permasalahan profesi guru, kompetensi penting profesi guru, dan upaya meningkatkan profesionalisme guru.

#### a. Perkemabangan dan Permasalahan Profesi Guru

Profesi guru adalah termasuk profesi yang tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada zaman prasejarah proses belajar mengajar berlangsung melalui pengamatan dan dilakukan oleh keluarga.<sup>11</sup> Proses pembelajaran dilakukan *one-to-one* dari rumah ke rumah dan di tempat-tempat ibadah. Katakan saja, sistem dan model pembelajaran lebih bercorak individual, artinya para murid belajar secara individual pada guru satu persatu. Tuntutan profesi guru juga mengikuti perkembangan dan model pembelajaran pada saat itu.

Pada saat sekarang ini, sejalan dengan perkembangan sistem persekolahan, maka profesi guru juga telah dan terus mengalami perubahan mengikuti tuntutan perubahan tersebut. Profesi guru pernah menjadi profesi penting dalam perjalanan bangsa ini dalam menanamkan nasionalisme, menggalang persatuan dan berjuang melawan penjajahan.

Profesi guru pada zaman dulu merupakan profesi yang paling bergensi dan menjadi dambaan bagi generasi muda pada saat itu. Tetapi, sayangnya pada beberapa dekade yang lalu dan masih berlanjut sampai kini “profesi guru dianggap kurang bergensi, kinerjanya dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Persoalan guru semakin menjadi persoalan pokok dalam pembangunan pendidikan yang disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan masyarakat dan perubahan global. Hingga kini persoalan guru belum pernah terselesaikan secara tuntas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> P. Ruspendi, 2004, Profesionalisme Guru, Harapan dan Kenyataan, From: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/0310.htm>, selasa 26 april 2005, jam 10.30

<sup>11</sup> Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, senin, 14-2-2005.

<sup>12</sup> Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10->

Patut diakui, bahwa guru selalu diberikan beban dan tanggung jawab yang berat dalam usaha mendidik anak bangsa, tetapi perhatian pada profesi mereka, berupa peningkatan kualitas melalui pelatihan, inservice training profesi, reward dan penghargaan yang memadai belum optimal diberikan pada mereka. Para pengamat dan penilai pendidikan dengan kapasitas ilmunya dengan mudah memberikan kritik terhadap profesi guru yang dianggap kurang bergengsi, kinerjanya yang dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi solusi jalan keluar yang bersifat action belum optimal diberikan pada mereka berupa pelatihan pada bidang pengetahuan dan keterampilan baru secara periodik.

Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan saat ini, guru semestinya dapat lebih mendapatkan pemberdayaan baik dalam arti profesi maupun kesejahteraan. Karena saat ini pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang terkait dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru tentu dapat langsung dipantau oleh pemerintah daerah.<sup>13</sup> Tetapi usaha keras itu, belum terlihat secara nyata dilakukan oleh pemerintah, sementara guru selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan harus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat.

Profesi guru di abad 21 ini sangat dipengaruhi oleh pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi. Guru dengan kemampuan artifisialnya dapat membelajarkan siswa dalam jumlah besar, bahkan dapat melayani siswa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Guru bukan lagi hanya mengendalikan siswa yang belajar di kelas, tetapi ia mampu membelajarkan jutaan siswa di kelas dunia memberi pelayanan secara individual pada waktu yang bersamaan. Sementara itu dengan bantuan teknologi informasi internet pembelajaran dapat dilakukan secara multiakses dan memberi layanan secara individual di mana saja, kapan saja dan di tempat di mana mereka berbeda.<sup>14</sup>

## **B. Kompetensi Penting Profesi Guru**

Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah kompetensi bidang substansi atau bidang

---

7.htm, akses, senin, 14-2-2005.

<sup>13</sup> Suyanto, From:<http://www.Suara merdeka.com...>

<sup>14</sup> Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekkom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, senin, 14-2-2005.

studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat.

Pengembangan profesionalisme guru meliputi peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja dan kesejahteraannya. Guru sebagai profesional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, wawasan dan kreativitasnya.<sup>15</sup>

Masyarakat dan orang tua murid telah mempercayakan sebagian tugasnya kepada guru. Tugas guru yang diemban cukup mulia dan berat, karena dari limpahan tugas masyarakat dan orang tua murid tersebut, antara lain adalah kemampuan guru mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dalam arti luas, keterampilan menjalani kehidupan, nilai-nilai dan beliefs.<sup>16</sup> Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun tiga pilar keterampilan, yaitu:

1. Learning skills, yaitu keterampilan mengembangkan dan mengola pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat.
2. Thinking skills, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal.
3. Living skills, yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggungjawab dan kepekaan sosial yang tinggi.<sup>17</sup>

### **C. Upaya Guru Meningkatkan Profesionalisme**

Suyanto, menyatakan bahwa "banyak program pendidikan baru yang inovatif diberlakukan oleh pemerintah dalam waktu paling tidak lima tahun terakhir ini, seperti broad based education, life skills, manajemen pendidikan berbasis sekolah, contextual teaching-learning (CTL), evaluasi belajar model portofolio, dan yang terakhir Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Semua itu kurang atau bahkan tidak mengikutsertakan guru sebagai variabel penting dalam pelaksanaan program-program itu, padahal semua program baru itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Lantas, bagaimana peran guru kita dalam pembaharuan dan inovasi pendidikan itu ? Inilah persoalannya.

Dengan banyaknya program baru itu, semestinya para guru didorong untuk memiliki profesionalisme yang lebih tinggi. Upaya peningkatan kualitas guru, seharusnya juga diikuti

---

<sup>15</sup> Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, senin, 14-2-2005.

<sup>16</sup> Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, senin, 14-2-2005.

<sup>17</sup> Sudjarwadi, KR, 5 -1-2003, dalam Hujair, 2003, hal. 199.

dengan kesejahteraan yang lebih memadai, tetapi kenyataan tidaklah seperti itu dan banyaknya program baru itu justru menambah beban kerja guru.<sup>18</sup> Lebih lanjut Suyanto menyatakan, ”penggagas pembaharuan pendidikan memiliki asumsi, bahwa guru dengan serta merta dapat melakukan apa saja yang menjadi program pembaharuan yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, asumsi inilah yang tidak benar. Sebab, kenyataannya guru harus mendapatkan retraining yang memadai dan tersistem untuk dapat melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat kembali kemampuan riil yang dimiliki guru untuk melakukan atau mengadopsi setiap inovasi dibidang pendidikan.<sup>19</sup> Maka, upaya peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya harus terpulung dan ditentukan oleh para guru itu sendiri serta harus dimulai sejak awal perekrutan guru. Hal ini, sebagaimana pernah disampaikan Ketua Umum PGRI, Muhammad Surya, bahwa pengembangan profesionalisme guru seharusnya sudah dimulai sejak masa perekrutan. Selain itu perlu didukung fasilitas yang memadai. Perbaikan kesejahteraan guru merupakan agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>20</sup>

Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut : **Pertama**, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

1. Persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara.
2. Sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik.
3. Untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belaiar secara terus menerus sepanjang hayat.
4. Guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

---

<sup>18</sup> Suyanto, From:<http://www.Suara merdeka.com...>

<sup>19</sup> Suyanto, 2004, From:<http://www.Suara merdeka.com...>

<sup>20</sup> Kompas, 30 Januari 2003

**Kedua** mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.

**Ketiga**, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau *networking*. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui *networking* inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya.

**Keempat**, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, semua sektor dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada kastemer atau pengguna. Maka, Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai *stakeholder*. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

**Kelima**, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak ketinggalan tidak “*gaptek*” (*gagap teknologi*) dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD dan komputer (*hard technologies*) dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (*soft technologies*),<sup>21</sup> menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab, perkembangan teknologi “*informasi dan internet*” merupakan faktor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan era reformasi pendidikan akan menghasilkan suatu tekanan atau *pressure* dan tuntutan terhadap profesionalisme guru dalam mendayagunakan teknologi komunikasi informasi tersebut, termasuk dalam hal pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya

---

<sup>21</sup> Purwanto, <http://www.pustekkom...>

profesinya, sebab profesi guru termasuk profesi yang kompetitif. Dengan demikian, guru harus siap dan bersedia untuk diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Sebab, di masa depan dapat dipastikan bahwa profil kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa yang dimulai dari merencanakan atau merancang, menganalisis, mengembangkan, mengimplementasikan dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.

#### **D. Persoalan Sertifikasi guru**

Masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai yang dikemukakan di atas diperlukan upaya peningkatan terhadap profesionalisme guru tersebut. Diperlukan upaya penilaian terhadap kinerja guru secara berkala untuk menjamin agar kinerja guru tetap memenuhi syarat profesionalisme. Tanpanya, Menteri Pendidikan Nasional, akan mencanangkan guru yang profesional. Tetapi, wacana yang mencuat ini terkait dengan rencana kebijakan tersebut adalah sertifikasi dan uji kompetensi guru, sebagai suatu wujud langkah untuk meningkatkan kualitas guru. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tanpanya pemerintah memandang perlu pembentukan sebuah badan independen profesi guru yang akan menilai profesionalisme guru. Badan tersebut, nantinya akan mengeluarkan sertifikat bagi para guru yang dinilai memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan sebagai profesi guru. Rencana tersebut, akan dikuatkan dengan keputusan presiden dan kini sedang digodok oleh tim kecil dengan unsur di antaranya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.<sup>22</sup>

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa badan independen tersebut nantinya berada di luar LPTK dan anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang memiliki keperdulian dan integritas untuk itu dapat menilai dan menjaga kewibawaan profesi guru. Badan tersebut mewakili stakeholder atau kepentingan publik, mulai dari pengguna, penyedia, pengatur, dan pengawas tenaga kependidikan. Lebih lanjut menurutnya, bahwa program dan penetapan kelulusan pendidikan profesi, juga ditentukan oleh badan profesi tersebut dan akan disusun persyaratan sehingga tidak semua LPTK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kompas, Rabu, 24 November 2004

<sup>23</sup> Kompas, 24 November 2004.

Kebijakan ini, tentu akan berdampak serius pada lembaga-lembaga pendidikan yang memproduksi tenaga keguruan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang berkualifikasi sajalah yang dapat dibenarkan untuk mendidik para calon guru. "Para calon guru harus mencapai gelar sarjana dahulu baru kemudian mengambil profesi guru dan untuk menjaga kualitas profesi guru direncanakan semacam lisensi guru yang tidak berlaku selamanya, tetapi harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Lisensi guru dapat dicabut jika guru tersebut membuat kesalahan atau melanggar kode etik profesinya".<sup>24</sup>

Kebijakan ini, perlu dihargai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, karena kebijakan tersebut untuk mengangkat harkat dan wibawa guru, sehingga lebih dihargai oleh pemakai tenaga profesi ini yang juga akan diikuti dengan standar gaji dan penghargaan yang layak bagi guru yang memiliki sertifikat tersebut. Tetapi, dalam kebijakan tersebut ada hal yang perlu dicermati yaitu "badan independen sertifikasi guru" tersebut berada di luar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK]. Artinya anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang diambil dari unsur-unsur yang "tidak berprofesi guru", tetapi memiliki keperdulian dan integritas untuk dapat menilai dan menjaga kewibawaan guru.

Hal ini, tentu akan menjadi tantangan dan persoalan serius bagi orang yang memiliki profesi guru itu sendiri dan mungkin juga guru yang sekarang sudah mengajar akan dinilai ulang oleh lembaga tersebut. Suatu hal yang sangat ironis sekali, guru-guru akan dinilai oleh "badan independen sertifikasi guru" yang tidak memiliki kompetensi kependidikan.

Dr. Abdorrahman Gintings, pengamat pendidikan dari Universitas Buya Hamka (UHAMKA), menyatakan bahwa sungguh sangat tidak profesional jika masyarakat terkait (guru dan pengelola pendidikan) tidak diajak bicara dan juga tidak tepat jika nantinya keanggotaan badan independen sertifikasi guru dapat diambil dari unsur-unsur yang tidak berprofesi guru yang kelak mengeluarkan sertifikasi bagi guru yang dianggap kompeten.<sup>25</sup>

Penilaian terhadap profesi guru mungkin dapat dilakukan oleh badan tersebut dengan baik, tetapi hasilnya mungkin kurang valid dan akurat, karena kemampuan guru dinilai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kependidikan dan keguruan. Sebab, penilai terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks yaitu menyangkut dengan

---

<sup>24</sup> Kompas, 24 November 2004.

<sup>25</sup> Kompas, 26 Nopember 2004

kemampuan profesional, personal, sosial termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru.

Abdorrahman Gintings, mencontohkan bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang medis, tetapi dia bukan dokter, tetap tidak pantas ikut menyertifikasi profesi dokter.<sup>26</sup> Begitu juga sertifikasi guru, bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang pendidikan, tetapi dia bukan berprofesi sebagai guru, maka tidak pantas ikut menyertifikasi profesi guru. Guru yang setiap harinya menggeluti profesinya dalam proses belajar mengajar dan tahu betul tentang prinsip-prinsip keguruan yang memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan untuk profesinya itu yang pantas dan layak dilibatkan dalam “badan independen sertifikasi guru” untuk melakukan sertifikasi terhadap guru dan bukan dari unsur-unsur yang tidak memiliki profesi sebagai guru.

Menurut Abdorrahman, jika kebijakan ini “dipaksakan, maka pemerintah bakal melecehkan dan mengusik nurani 2,2 juta guru di Tanah Air” Indonesia ini. Maka, jangan sampai kebijakan tentang guru yang sifatnya fundamental ditetapkan terburu-buru dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat guru itu sendiri.<sup>27</sup>

Kemampuan guru dalam upaya mendidik jangan disederhanakan dengan kemampuan mengajar saja, sehingga dapat dinilai sepintas oleh siapa saja. Tetapi, mendidik bukan sekedar membutuhkan pemahaman tentang materi pelajaran, tetapi juga melibatkan hati dan nurani dalam wujud interaksi antara guru dan murid, karena mendidik membutuhkan penjiwaan. Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan dan selalu mendapatkan julukan “pahlawan tanpa jasa”. Namun pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi, artinya dari pada membentuk badan baru, akan lebih baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas keguruan eks IKIP atau FTK diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru.

Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru perlu ditingkatkan kualitas, sehingga memiliki kualifikasi untuk dapat mendidik para calon guru.

---

<sup>26</sup> Kompas, 26 Nopember 2004

<sup>27</sup> Kompas, 26 Nopember 2004

## **E. Penutup**

Permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait, yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru, dan tersedianya fasilitas yang memadai. Sungguh berat tugas guru, tetapi penghargaan pada profesi guru kurang optimal, tetapi para guru selalu dinilai kinerjanya rendah dan kurang optimal.

Perlu ada perhatian yang serius kepada para guru, yaitu mereka harus selalu mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perlu ada sistem peningkatan pengetahuan bagi guru secara tersistem dan berkelanjutan atau ada inservice training yang baik bagi para guru. Para guru harus siap untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerjanya agar memiliki kompetensi yang optimal dalam usaha membimbing siswa agar siap menghadapi kenyataan hidup (the real life) dan bahkan mampu memberikan contoh teladan bagi siswa, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan dan menjadi dambaan setiap orang.

Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan. Tetapi, pemerintah harus mengikutsertakan guru-guru atau tenaga kependidikan sebagai variabel penting dalam "badan independen sertifikasi guru" tersebut dan badan tersebut tetap berada dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi tetapi akan lebih baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas keguruan eks IKIP dan FTK diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru.

Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru, perlu ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi profesional penyelenggaraan, kurikulum, metode pembelajaran, sistem penilaian dan manajemennya, sehingga memiliki "kualifikasi" untuk dapat mendidik para calon guru yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Hati-hati Sertifikasi Guru, From: <http://66.102.9.104/search?q= cache:>
- \_\_\_\_\_, 2004, Tantangan Pendidikan Islam di Era Informasi (Pergeseran Paradigma Pendidikan Islam Indonesia di Era Informasi), Jurnal Stusi Islam, MUKADDIMAH, Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 16 TH.X/2004, ISSN:0853-6759, Yogyakarta. 10.30 akses, selasa, 26 April 2005, jam 10.15.
- Asep Saeful Mimbar dan Agus Sulthonie, Tantangan Madrasah Dewasa Ini, Pikiran bpkpenabur.or.id/index.php?option=com\_content&task=view&id=18&Itemid=27, c60QtyluWW4J:www.kompas.com/kompas-ceta., akses. 27/11/2004.
- E. Mulyasa, 2002, Manajemen berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fazlur Rahman, 1985, Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual, Terj., Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung.  
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/0310.htm>, selasa 26 april 2005, jam
- Hujair AH. Sanaky, 2003, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Safiria Insania Press dan MSI, Yogyakarta.
- Kompas, Rencana Badan Independen Sertifikasi Guru, From: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/24/humaniora/1398342.htm>., akses, 17/11/2004.
- Maman, 2005, Upaya Memantapkan Profesionalisme Guru, Pikiran Rakyat, Bandung, 24 Maret 2005, From: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/24/1105.htm>, selasa 26 april 2005, jam 10.30
- Mastuhu, 1999, Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam, Logos, Jakarta.
- Muhammad Surya, Pengembangan Profesionalisme Guru, Kompas, 30 Januari 2003, Jakarta.
- Naniek Setijadi, 2004, Tantangan Profesionalisme Guru Masa Depan, From: <http://tpj.onno.w.purbo.net/onno/jurnal/2004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml>., akses, 16 Mei 2002.
- P. Ruspindi, 2004, Profesionalisme Guru, Harapan dan Kenyataan, From: Paul Suparno, 2004, Guru Demokratis di Era Reformasi, Grasindo, Jakarta.
- Purwanto, Profesionalisme Guru, From: <http://www.pustekkom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, senin, 14-2-2005.
- Rakyat, Artikel Edisi 25 Juli 2001, Form: <http://www.pikiran-rakyat.com/prcetak/072001/25/0801.htm>. 2002.

Sudjarwadi, “Ubah Wajah UGM dengan Jiwa Kepemimpinan”, Kedaulatan Rakyat, 5 Januari 2003, hlm.10.

Suyanto, 2004, *Mobilitas Horizontal bagi Guru Bermutu Suara Merdeka*, Kamis, 30 Desember 2004, From: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/30/opi04.htm>, selasa 26 april 2005, jam. 10.30

Winarno Surakhmad, 2002, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From:<http://www.Bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm>, akses, 27 Mei 2002.